REKOMENDASI KEBIJAKAN

PENGELOLAAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DI DESA PRABU
TAHUN 2025

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DATA INDEKS KERENTANAN
DAN INDEKS KETAHANAN DAERAH (SIDIK)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

Ringkasan Eksekutif

Permasalahan Mendasar

Desa Prabu Kecamatan Pujut menghadapi tantangan besar dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim yang kian nyata dampaknya. Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi faktor utama yang meningkatkan keterpaparan masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Sebagian besar warga menggantungkan hidup pada sumber penghasilan utama yang bersifat musiman dan rentan, seperti sektor pertanian tadah hujan, tanpa adanya diversifikasi ekonomi yang memadai.

Kondisi ini diperburuk oleh ketergantungan rumah tangga terhadap sumber energi yang belum ramah lingkungan, seperti kayu bakar, yang berdampak pada kerusakan hutan dan mempercepat degradasi lingkungan. Di sisi lain, masih banyak wilayah pemukiman yang belum memiliki ramburambu evakuasi kebencanaan, meskipun daerah tersebut kerap terdampak bencana seperti banjir dan angin kencang. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat sensitivitas wilayah terhadap risiko iklim dan bencana.

Dari sisi kapasitas adaptif, desa ini masih memiliki banyak kekurangan. Akses terhadap fasilitas listrik belum merata, sarana pendidikan dan kesehatan masih terbatas, serta infrastruktur ekonomi belum mampu mendukung penguatan daya tahan masyarakat. Minimnya lembaga keuangan lokal juga menyulitkan masyarakat untuk membangun cadangan aset atau modal usaha yang dapat meningkatkan daya lenting mereka terhadap kejutan iklim.

Kegiatan pelestarian lingkungan pun masih minim dan belum menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh warga. Kurangnya edukasi dan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan menjadi penghambat dalam upaya mitigasi jangka panjang.

Dengan kondisi ini, jelas bahwa upaya membangun ketahanan iklim di Desa Prabu harus ditempuh melalui pendekatan yang menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga menekankan pada pemerataan pembangunan, penguatan kapasitas adaptif masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dan kelembagaan di tingkat desa.

Rekomendasi Kebijakan

Desa Prabu di Kabupaten Lombok Tengah kini menghadapi tantangan lingkungan yang semakin nyata akibat perubahan iklim yang memicu terjadinya pemanasan global. Gejala yang dirasakan masyarakat antara lain perubahan pola musim yang tidak menentu, cuaca ekstrem seperti kekeringan panjang maupun hujan deras dalam waktu singkat, serta berkurangnya ketersediaan air bersih. Dampak ini sangat dirasakan oleh warga, terutama yang menggantungkan hidupnya pada pertanian, peternakan, dan sumber daya lokal lainnya. Ketahanan ekonomi warga juga mulai terganggu, ditambah dengan kondisi infrastruktur dasar yang masih terbatas serta tata kelola lingkungan yang belum optimal.

Untuk menjawab tantangan ini, Desa Prabu perlu membangun sistem adaptasi berbasis potensi lokal, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya harus bersandar

pada kebijakan nasional, tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa. Misalnya, program pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengelolaan air dan pertanian, penguatan kapasitas kelompok tani dan UMKM desa, serta edukasi lingkungan berbasis sekolah dan komunitas lokal.

Pemerintah desa bersama BPD, tokoh masyarakat, dan kelompok rentan, perlu menyusun perencanaan yang memasukkan isu perubahan iklim sebagai bagian dari arah pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan berketahanan iklim yang telah menjadi prioritas nasional. Dokumen seperti RPJMDes dan RKPDes menjadi wadah strategis untuk mengintegrasikan langkah-langkah adaptasi dan konservasi lingkungan, misalnya melalui kegiatan rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah berbasis warga, serta pembangunan sarana air bersih yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Dukungan dari pemerintah kabupaten, dinas teknis, lembaga non-pemerintah, dan pihak swasta juga sangat dibutuhkan agar Desa Prabu memiliki akses pada pendanaan, teknologi, dan pendampingan yang memadai. Kolaborasi lintas sektor inilah yang akan menjadi kunci agar desa mampu memperkuat ketahanan sosial-ekologisnya, melindungi sumber daya alam yang ada, dan memastikan bahwa seluruh warga – terutama kelompok rentan – tidak tertinggal dalam menghadapi risiko iklim di masa mendatang.

I. Pendahuluan

Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu global, tetapi telah menjadi kenyataan yang memengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat lokal, termasuk di Desa Prabu, Kabupaten Lombok Tengah. Dampaknya sangat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari gangguan musim tanam, meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, hingga ancaman terhadap ketersediaan air dan kesehatan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan desa, isu perubahan iklim kini menjadi perhatian utama. Hal ini sejalan dengan arahan nasional dalam Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan SDGs, di mana ketahanan iklim merupakan bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan Indonesia hingga tahun 2030. Desa Prabu turut merespons tantangan ini dengan mengadopsi pendekatan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan mendukung target-target penurunan risiko bencana serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menetapkan misi kelima tentang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi sebagai dasar untuk menghadapi tantangan perubahan iklim di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun desa tidak menyusun RPJPN, semangat dan arah kebijakan ini diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Prabu, dengan mendorong pengarusutamaan program-program ramah lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Desa Prabu bekerja sama dengan mitra pembangunan yaitu World Neighbors dan Pusat Studi Pembangunan (PSP)-NTB dalam menyusun data kerentanan iklim berbasis masyarakat. Hasilnya menjadi masukan penting dalam merancang kegiatan pembangunan desa yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Rekomendasi kebijakan yang bersumber dari praktik-praktik lokal ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan desa terhadap ancaman iklim, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target-target pembangunan nasional, termasuk penurunan Indeks Kerentanan dan emisi GRK di tingkat tapak. Desa Prabu menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif dan berketahanan iklim dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilandasi kesadaran kolektif dan semangat gotong royong masyarakat desa.

II. Latar Belakang

Desa Prabu di Kabupaten Lombok Tengah kini menghadapi tantangan lingkungan yang semakin nyata akibat perubahan iklim. Gejala yang dirasakan masyarakat antara lain perubahan pola musim yang tidak menentu, cuaca ekstrem seperti kekeringan panjang maupun hujan deras dalam waktu singkat, serta berkurangnya ketersediaan air bersih. Dampak ini sangat dirasakan oleh warga, terutama yang menggantungkan hidupnya pada pertanian, peternakan, dan sumber daya lokal lainnya. Ketahanan ekonomi warga juga mulai terganggu, ditambah dengan kondisi infrastruktur dasar yang masih terbatas serta tata kelola lingkungan yang belum optimal.

Untuk menjawab tantangan ini, Desa Prabu perlu membangun sistem adaptasi berbasis potensi lokal, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya harus bersandar pada kebijakan nasional, tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa.

Pemerintah desa bersama BPD, tokoh masyarakat, dan kelompok rentan, perlu menyusun perencanaan yang memasukkan isu perubahan iklim sebagai bagian dari arah pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan berketahanan iklim yang telah menjadi prioritas nasional. Dokumen seperti RPJMDes dan RKPDes menjadi wadah strategis untuk mengintegrasikan langkah-langkah adaptasi dan konservasi lingkungan, misalnya melalui kegiatan rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah berbasis warga, serta pembangunan sarana air bersih yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Dukungan dari pemerintah kabupaten, dinas teknis, lembaga non-pemerintah, dan pihak swasta juga sangat dibutuhkan agar Desa Prabu memiliki akses pada pendanaan, teknologi, dan pendampingan yang memadai. Kolaborasi lintas sektor inilah yang akan menjadi kunci agar desa mampu memperkuat ketahanan sosial-ekologisnya, melindungi sumber daya alam yang ada, dan memastikan bahwa seluruh warga – terutama kelompok rentan – tidak tertinggal dalam menghadapi risiko iklim di masa mendatang.

III. Permasalahan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan desa, identifikasi persoalan yang dihadapi oleh Desa Prabu mengacu pada pendekatan yang diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dalam konteks ini, suatu permasalahan didefinisikan sebagai adanya celah atau ketimpangan antara capaian saat ini dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Celah ini bisa muncul akibat terbatasnya sumber daya, kebijakan yang belum optimal, atau dampak dari faktor eksternal seperti perubahan iklim.

1. Ketahanan daerah terhadap perubahan iklim

   Sebagai desa yang berada di wilayah dataran dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan sumber daya air, Prabu menghadapi tantangan yang kian kompleks akibat gejala perubahan iklim. Perubahan pola musim, meningkatnya suhu harian, serta curah hujan yang tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan gangguan terhadap produksi pertanian, mengancam ketersediaan air bersih, dan meningkatkan risiko terhadap kesehatan warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan anak-anak.

   Menindaklanjuti tantangan tersebut, Pemerintah Desa Prabu turut mendukung proses pemetaan kerentanan iklim yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penilaian ini berlangsung pada tahun 2025 dan memanfaatkan alat ukur resmi berupa Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui pendekatan ini, desa memperoleh data yang lebih terukur dan berbasis risiko terkait potensi dampak iklim terhadap wilayah dan masyarakatnya.

   Hasil penilaian menjadi dasar penting bagi Desa Prabu dalam menyusun kebijakan adaptasi iklim yang relevan dengan kondisi lokal. Strategi ini mencakup perencanaan jangka panjang untuk penguatan ketahanan sumber daya alam, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kejadian iklim ekstrem. Pendekatan berbasis data dan partisipasi komunitas ini diharapkan dapat mendorong arah pembangunan desa yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

No	Komponen	Indikator	Skor
1	Indeks Kapasitas Adaptif (IKA)	Fasilitas Listrik	0,2
2		Fasilitas Pendidikan	0,445
3		Fasilitas Kesehatan	0,132
4		Infrastruktur Jalan	1
5		Kelembagaan	0,95
6		Komunikasi	0,97
7		Industri Kecil dan Mikro	0,85
8		Fasilitas Kredit yang Diterima Warga	0,7
9		Sarana dan Prasarana Ekonomi	0,75

10		Lembaga Keuangan	0
11		Kegiatan Sosial	0,7
12		Kegiatan Pelestarian Lingkungan	0
13		Jaminan Kesehatan	0
1	Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS)	Sumber mata penghasilan utama	0,2
2		Tingkat Kemiskinan	0,07
3		Sumber Bahan Bakar	0,1
4		Topografi Desa	0
5		Fasilitas Jamban	0
6		Tempat Buang Sampah	0
7		Air Bersih	0
8		Kepadatan penduduk	0,04

Keterangan

KATEGORI	IKA	IKS
Sangat Tinggi	0,9 - 1	0,9 - 1
Tinggi	0,7 - 0,8	0,7 - 0,8
Sedang	0,5 - 0,6	0,5 - 0,6
Rendah	0,3 - 0,4	0,3 - 0,4
Sangat Rendah	0 - 0,2	0 - 0,2

Tabel 1. Hasil Penilaian Indeks Kerentanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.

IV. Rekomendasi

Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di Desa Prabu, dilakukan dengan pendekatan Manajemen Berbasis Hasil (Results-Based Management). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ketahanan wilayah. Proses penyusunan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan utama, yaitu identifikasi masalah, perumusan tujuan dan hasil yang ingin dicapai, penyusunan indikator kinerja, serta penetapan strategi dan intervensi kebijakan yang relevan. Rekomendasi ini juga telah disandingkan dan dipadupadankan dengan dokumen RPJMDes Prabu tahun 2025–2029, agar selaras dengan arah pembangunan desa dan mendukung integrasi isu perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa.

1. Identifikasi permasalahan dan isu strategis

   Tahapan awal dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang berkaitan dengan ketahanan terhadap perubahan iklim. Permasalahan yang dihadapi Desa Prabu berdasarkan hasil penilaian dan analisis situasi antara lain adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan Pokok	Penyebab
1	Tingginya keterpaparan dan sensitifitas	**Tingkat Kemiskinan** Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Desa Prabu menjadi faktor utama yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Keterbatasan sumber daya ekonomi menyebabkan masyarakat memiliki akses terbatas terhadap sarana perlindungan, informasi, dan pemulihan pasca-bencana, sehingga memperparah dampak yang ditimbulkan.
		Sumber Mata Penghasilan Utama Sebagian besar penduduk menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian dan pekerjaan informal yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim. Ketika terjadi kekeringan, banjir, atau perubahan musim yang tidak menentu, penghasilan mereka dapat menurun drastis, memperbesar risiko ketahanan ekonomi keluarga.

		Sumber Bahan Bakar Penggunaan bahan bakar yang masih bergantung pada kayu bakar menunjukkan keterbatasan akses terhadap energi bersih dan modern. Selain berisiko terhadap kesehatan karena asap, praktik ini juga mempercepat degradasi lingkungan dan meningkatkan emisi karbon, yang memperburuk dampak perubahan iklim.
		Penduduk Terdampak Bencana Desa Prabu tercatat pernah mengalami beberapa kejadian bencana, seperti banjir lokal, longsor kecil, atau kekeringan musiman, yang berdampak langsung pada sebagian penduduk. Jumlah warga yang terdampak menunjukkan bahwa masih terdapat wilayah-wilayah rawan yang belum sepenuhnya terlindungi atau siap menghadapi bencana.
		Rambu Kebencanaan Minimnya keberadaan rambu kebencanaan atau sistem peringatan dini di lokasi-lokasi strategis desa menandakan rendahnya
		kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bahaya. Ketiadaan informasi visual ini dapat menghambat proses evakuasi dan penyelamatan saat terjadi bencana.
2	Minimnya kapasitas adaptif	**Fasilitas Listrik** Tersedianya listrik di sebagian besar wilayah desa mendukung kegiatan belajar-mengajar, usaha rumahan, serta akses informasi melalui media digital. Ketersediaan energi listrik ini menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup dan adaptasi teknologi, termasuk dalam hal peringatan dini bencana.
		Fasilitas Pendidikan Adanya sekolah dasar hingga menengah di desa menjadi modal penting dalam membangun kapasitas sumber daya manusia. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas memungkinkan generasi muda memahami isu-isu lingkungan dan bencana, serta mengembangkan keterampilan adaptif jangka panjang.
		Fasilitas Kesehatan Keberadaan posyandu dan puskesmas pembantu membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar. Hal ini penting dalam mengurangi risiko penyakit saat terjadi bencana, serta dalam meningkatkan ketahanan fisik masyarakat melalui layanan promotif dan preventif.
		Sarana Prasarana Ekonomi Infrastruktur ekonomi seperti jalan desa, pasar lokal, dan fasilitas distribusi hasil pertanian mendorong keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat. Ketahanan ekonomi yang kuat sangat berkontribusi terhadap kemampuan adaptasi, khususnya dalam merespons gangguan penghidupan akibat bencana atau perubahan musim.

		Lembaga Keuangan Adanya koperasi, kelompok arisan, dan lembaga keuangan mikro memberikan akses permodalan bagi warga, khususnya dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah. Selain itu, keberadaan lembaga ini mempermudah masyarakat dalam membangun dana cadangan atau dana tanggap darurat, yang penting dalam konteks adaptasi.
		Kegiatan Pelestarian Lingkungan Masyarakat Desa Prabu mulai terlibat dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan pelestarian mata air. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekosistem lokal, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari strategi adaptasi jangka panjang.

Tabel 2. Permasalahan Kerentanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Dalam penyusunan rekomendasi yang berkaitan dengan ketahanan Desa Prabu terhadap perubahan iklim, digunakan pendekatan aset penghidupan (livelihood assets). Pendekatan ini diadopsi untuk memahami secara menyeluruh berbagai faktor yang memengaruhi kapasitas adaptif masyarakat desa dalam menghadapi risiko iklim. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pada tingkat individu, rumah tangga, maupun kelembagaan lokal yang ada di desa.

Melalui pendekatan ini, isu-isu strategis dapat diidentifikasi secara lebih holistik, lintas sektor, dan sesuai dengan konteks lokal Desa Prabu. Hal ini penting agar intervensi yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan dan potensi desa secara menyeluruh.

Pendekatan aset penghidupan ini mencakup lima kategori utama, yaitu:

No	Komponen	Isu Strategis
1	Modal Alam	Merujuk pada sumber daya alam yang tersedia di Desa Prabu, seperti tanah, air, hutan, udara bersih, dan keanekaragaman hayati. Aset ini menjadi dasar penghidupan masyarakat, khususnya yang bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Kualitas dan ketersediaan aset alam sangat menentukan ketahanan desa terhadap kekeringan, banjir, dan degradasi lingkungan.
2	Modal Manusia	Menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa, termasuk tingkat pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan pengalaman. Aset ini berperan penting dalam membangun kapasitas adaptif melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis, dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3	Modal Ekonomi	Terdiri atas pendapatan, tabungan, akses terhadap lembaga keuangan, kredit mikro, atau bantuan sosial. Aset finansial memengaruhi kemampuan masyarakat untuk melakukan investasi dalam penghidupan yang berkelanjutan, memperbaiki kerusakan pasca-bencana, atau membangun cadangan untuk menghadapi risiko di masa depan.

4	Modal Sosial	Berupa jaringan sosial, hubungan kepercayaan, kerjasama antarwarga, serta keberadaan lembaga lokal seperti kelompok tani, kelompok perempuan, adat, dan karang taruna. Aset sosial mendukung mobilisasi sumber daya, memperkuat solidaritas, serta mempercepat penyebaran informasi dan bantuan saat terjadi krisis.
5	Modal Fisik	Meliputi infrastruktur dan sarana fisik yang mendukung kehidupan masyarakat, seperti jaringan listrik, fasilitas air bersih, jalan, jembatan, bangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dan peralatan produksi. Aset fisik yang memadai meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari dampak bencana atau perubahan iklim.

Tabel 3. Rumusan Isu Strategis

2. **Penetapan Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis di Desa Prabu, dirumuskan tujuan jangka menengah dan sasaran yang realistis untuk dicapai dalam lima tahun ke depan menggunakan pendekatan Theory of Change. Pendekatan ini membantu merancang langkah-langkah secara bertahap, mulai dari menetapkan tujuan, merumuskan hasil-hasil yang ingin dicapai, menentukan kegiatan pendukung, hingga menyusun indikator keberhasilan di setiap tahap. Dengan cara ini, setiap kegiatan yang dilakukan di desa dapat terukur dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim secara bertahap dan berkelanjutan.

3. **Perumusan Rekomendasi**

Rekomendasi yang dihasilkan dalam dokumen ini merupakan usulan kebijakan dan program prioritas untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, baik di tingkat daerah maupun di tingkat desa, khususnya di Desa Prabu. Penyusunan rekomendasi dilakukan menggunakan pendekatan Manajemen Berbasis Hasil (Results-Based Management), yang menekankan pada pentingnya pencapaian hasil nyata, terukur, dan berkelanjutan. Prosesnya dimulai dari identifikasi masalah utama, penyusunan tujuan dan hasil yang ingin dicapai, hingga perumusan strategi intervensi yang relevan. Seluruh rekomendasi ini telah disandingkan dan dipadupadankan dengan dokumen RPJMDes Prabu Tahun 2025–2029, guna memastikan keselarasan arah pembangunan desa serta memaksimalkan integrasi isu perubahan iklim ke dalam kebijakan dan perencanaan jangka menengah desa. Rekomendasi mencakup berbagai sektor seperti energi terbarukan, pendidikan, perlindungan anak, konservasi sumber daya alam, keuangan inklusif, pelestarian lingkungan, pertanian berkelanjutan, tata kelola bencana, serta penguatan kelembagaan dan regulasi daerah.

No	Indeks	Indikator	Rekomendasi strategis	Rekomendasi teknis
1	IKA	Sektor Listrik	1. Peningkatan kwalitas infrastruktur listrik di Kabupaten Lombok Tengah 2. Pengembangan kerja sama dengan swasta terkait sektor kelistrikan yang rendah karbon 3. Peningkatan pengembangan listrik tenaga surya di wilayah-wilayah yang memiliki intensitas pencahayaan tinggi 4. Pengembangan listrik tenaga sampah di Kabupaten Lombok Tengah	1. Pemasangan listrik secara gratis khusus masyarakat DTKS 2. Perbaikan kualitas dan kuantitas lampu jalan (PJU) dengan solar cell 3. Pengembangan listrik berbasis pedesaan (angin, air, ombak, tenaga surya) 4. Pemasangan jaringan listrik ke wilayah desa yang belum tersentuh jaringan listrik

2		Sektor Pendidikan	1. Penyusunan regulasi dan kebijakan pendidikan 2. Membangun sistem data dan informasi yang mendukung pengambilan kebijakan untuk untuk akselerasi pendidikan dasar 3. Pengadaan beasiswa retrival untuk anak putus sekolah 4. Mengembangkan sekolah-sekolah unggulan dan sekolah rakyat 5. Meningkatkan dan pemerataan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana antar satuan pendidikan 6. Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar) 7. Peningkatan akses pendidikan usia dini dan pendidikan dasar bagi semua kalangan masyarakat 8. Peningkatan kwalitas sarana-prasarana penunjang pendikan 9. Pengembangan kurikulum pendidikan aman bencana (SPAB) 10. Pengembangan infrastruktur pendidikan aman bencana 11. Pengadaan rambu-rambu kebencanaan di sekolah-sekolah	1. Penambahan jumlah sarana prasarana pendidikan 2. Rehabilitasi penunjang sarana pendidikan, seperti: MCK, perpustakaan, ruang UKS 3. Membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana (SPAB) 4. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di wilayah terisolir 5. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan menuju sekolah-sekolah

3		Sektor Kesehatan	1. Peningkatan asupan gizi ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita dan lansia. 2. Pemberian insentif untuk kader posyandu 3. Pengembangan dapur sehat untuk mengatasi gizi buruk dan stunting 4. Pengembangan dukungan makan bergizi gratis (MBG) 5. Penguatan peran dan fungsi posyandu, kader dan juru pemantau jentik 6. Peningkatan kwalitas sarana dan prasarana posyandu	1. Peningkatan asupan gizi ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita dan lansia. 2. Pemberian insentif untuk kader posyandu 3. Pengembangan dapur sehat untuk mengatasi gizi buruk dan stunting 4. Pengembangan dukungan makan bergizi gratis (MBG)

			7. Peningkatan kwantitas BPJS kesehatan bagi masyarakat desa 8. Peningkatan kwalitas layanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan klinik. 9. Pengadaan kegiatan poging diwilayah-wilayah dengan populasi nyamuk tinggi.	5. Penguatan peran dan fungsi posyandu, kader dan juru pemantau jentik 6. Peningkatan kwalitas sarana dan prasarana posyandu 7. Peningkatan kwalitas layanan kesehatan di puskesmas dan posyandu 8. Pengadaan kegiatan poging diwilayah-wilayah dengan populasi nyamuk tinggi.
4		Sektor Infrastruktur Jalan	1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan di daerah yang terisolir 2. Pembangunan infrastruktur jalan yang ramah disabilitas, orang tua, dan kelompok rentah lainnya 3. Mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur jalan yang berkwalitas dan inklusif	1. Pembukaan jalan-jalan baru yang aman bencana 2. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan di daerah yang terisolir

5		Sektor Kelembagaan	1. Pengembangan UPT BPBD di 3 wilayah yaitu wilayah utara, tengah dan selatan kabupaten lombok tengah 2. Peningkatan kapasitas BPBD 3. Penambahan armada untuk bencana kekeringan	1. Peningkatan kapasitas dan pembentukan destana 2. Peningkatan jumlah rambu-rambu evakuasi dan rambu peringatan rawan bencana 3. Pemasangan EWS bencana gempa bumi dan tsunami

6		Sektor Industri Kecil & Mikro	1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan jangkauan promoso dan pemasaran ekonomi kreatif 2. Pengembangan ekonomi kreatif dengan membuka pusat inovasi, vasilitas akses modal dan membuka akses pasar 3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru sentra-sentra komoditas unggulan 4. Penyediaan ruang kreativitas bagi generasi muda 5. Penguatan kapasitas dan permodalan UMKM dan IKM untuk meningkatkan kualitas dan akses pasar 6. Pengembangan dukungan dan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih 7. Pengembangan inovasi produk dari sumber daya lokal 8. Pembangunan dan rehabilitasi pasar-pasar tradisional 9. Pengembangan sektor ekonomi hijau dan ekonomi biru	1. Pelatihan peningkatan kapasitas pengolahan makanan berdasarkan sumber daya alam setiap desa 2. Pelatihan pemasaran berbasisi digital 3. Subsidi modal bagi usaha kecil dan menengah. 4. Penguatan kapasitas administrasi bagi pelaku usaha mandiri dan komunitas 5. Pengembangan pangan lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan dan peningkatan insustri kecil, mikro dan menengah

7	Sektor Kredit yang diterima warga	1. Pengembangan kredit tanpa agunan dengan suku bunga kecil	1. Meningkatkan kerja sama denga penyedia fasilitas kredit 2. Pengembangan kelompok usaha simpan pinjam
8	Sektor Sarana Prasarana Ekonomi	1. Peningkatan kwalitas sarana prasarana pasar-pasar tradisional 2. Penertiban aktifitas pasar-pasar tradisional agar tidak mengganggu pengguna jalan 3. Relokasi pasar-pasar yang berada dipinggir jalan 4. Penertiban koperasi (jasa) keuangan 5. Pemantauaan faslitas keuangan yang legal	1. Penambahan jumlah lapak UMKM di pasar umum, terminal dan tempat wisata. 2. Akses modal mudah dan faslitas kredit dengan suku bunga rendah 3. Peningkatan pemantauan faslitas kredit yang aman
		6. Peningkatan prasarana pengangkut sampah	
9	Sektor Lembaga Keuangan	1. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kemudahan pelayanan pajak dan retribusi daerah 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 3. Peningkatan jumlah Investor	1. Memperbanyak peluang untuk PAD 2. Mempermudah proses izin bagi investor

10		Sektor Pelestarian Lingkungan	1. Reboisasi, penghijauan dan konservasi sumberdaya alam 2. Pelestarian lingkungan hidup sebagai dampak pembangunan KEK Mandalika dan daerah penyangga 3. Optimalisasi pengelolaan sampah terpadu 4. Pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah 5. Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah terpadu dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan limbah 6. Pengembangan mitigasi struktural dan nonstruktural di wilayah rawan bencana 7. Pengembangan infrastruktur pelindung pantai untuk mengurangi dampak abrasi 8. Rehabilitasi kawasan hutan dan daerah tangkapan air 9. Pembangunan embung dan sumur resapan untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau 10. Kampanye tentang konservasi mata air	1. Pengembangan teknologi pertanian tahan kekeringan 2. Konservasi sumber mata air 3. Rehabilitasi kawasan hutan dan daerah tangkapan air 4. Pembangunan embung dan sumur resapan untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau 5. Pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah 6. Reboisasi, penghijauan dan konservasi sumberdaya alam 7. Optimalisasi pengelolaan sampah terpadu

11		Sektor Kegiatan Sosial	1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang adat istiadat dan budaya 2. Penguatan kelembagaan sosial dan partisipasi masyarakat 3. Peningkatan terhadap layanan dasar dan infrastruktur penunjang 4. Adanya kebijakan sosial gotong royong tentang secara berkala 5. Adanya iven-iven untuk meningkatkan sosial masyarakat 6. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang menerima PKH dan sembako, penyandang disabilitas, LKS 7. Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan sosial adaptif 8. Penguatan sistim data regulasi dan kebijakan perlindungan sosial adaptif 9. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat 10. Pendataan, inventaris dan digitalisasi situs-situs budaya dan sejarah 11. Peningkatan pelestarian adat, tradisi, budaya dan lingkungan sebagai identitas dan citra kabupaten lombok tengah	1. Ketersediaan data DTKS yang valid sehingga tepat sasaran 2. Memberikan bantuan sesuai kebutuhan seperti kursi roda, tongkat, dll 3. Pengadaan iven-iven sosial untuk meningkatkan hubungan emosional yg baik masyarakat 4. Pemberian bantuan kepada masyarakat

12		Sektor Jaminan Kesehatan	1. Penguatan kapasitas layanan kesehatan dalam menghadapi meningkatnya penyakit berbasis iklim seperti diare, ispa serta DBD 2. Penerapan sistim peringatan dini penyakit berbasis iklim yang efektif 3. Sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat	1. Peningkatan akses BPJS kesehatan 2. Peningkatan kwalitas layanan kesehatan bagi masyarakat 3. Peningkatan kapasitas kader-kader dan nakes tingkat desa dan kabupaten 4. Peningkatan kwalitas dan kelengkapan sarana prasarana kesehatan

1	IKS	Sektor Kepadatan Penduduk	1. Pengembangan kewilayahan administratif kewilayanan kecamatan dan desa 2. Fasilitasi perizinan dalam proses penyediaan perumahan sesuai tata ruang wilayah 3. Perbaikan lingkungan kawasan kumuh 4. Pengembangan kampung KB 5. Sosialisasi masif keluarga berencana dan keluarga bahagia 6. Menakan angka kelahiran 7. Program transmigrasi	1. Sosialisasi penggunaan KB untuk menekan angka kelahiran 2. Program transmigrasi

V. Penutup

Dengan merujuk pada pendekatan berbasis hasil Analisa SIDIK Desa Prabu dan memastikan keterpaduan dengan RPJMDes Prabu 2025–2029, seluruh rekomendasi dan strategi yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi pijakan bersama dalam mewujudkan desa yang tangguh terhadap perubahan iklim. Proses penyusunan yang partisipatif, berbasis data, serta mempertimbangkan kekuatan lokal dan konteks wilayah, memberikan keyakinan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan. Kolaborasi multipihak serta komitmen bersama menjadi kunci utama agar transformasi menuju ketahanan iklim dapat tercapai secara nyata dan berdampak luas bagi masyarakat.